



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZIZ PURWANTORO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN
3. NHK : 972243

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.080.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m²/130 m² di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/57 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m²/22 m² di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 635.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m²/85 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/151 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Tanah Seluas 235 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 189 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1993, HIBAH TANPA AKTA Rp. 40.000.000



2. MOBIL, HONDA HONDA CITY HACTHBACK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	37.714.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	264.625.591
F. HARTA LAINNYA	Rp.	31.868.433
Sub Total	Rp.	6.676.308.024
III. HUTANG	Rp.	55.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.621.308.024

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.